

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemerintahan desa merupakan sebuah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengelola wilayah tingkat desa. Kesejahteraan dan kemajuan suatu desa salah satunya bergantung pada kinerja pemerintah desa. Kinerja pemerintah sendiri merupakan bagian dari implementasi suatu program, kegiatan atau kebijakan untuk mencapai visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi. Adapun cara untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan program dalam suatu organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja pada sektor publik dirancang untuk membantu manajer publik mendemonstrasikan hasil implementasi startegi, melalui alat pengukuran keuangan dan non keuangan.

Dalam beberapa tahun ini pembangunan desa menjadi salah satu program utama pemerintah, salah satunya melalui pemberian dana yang disebut dana desa. Dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan terhadap pembangunan desa. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah kepada pemerintah desa pun mulai mengalami banyak peningkatan dari segi kuantitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagaimana terlihat dari tabel anggaran dana desa sebagai berikut:

Tabel 1.1**Anggaran Dana Desa Kabupaten Pamekasan**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp.70 Triliun
2	2020	Rp.72 Triliun
3	2021	Rp.72 Triliun

Sumber: <http://www.bpkp.go.id>, diolah

Dalam hal ini, banyak desa yang berhasil untuk mengelola keuangannya. Namun ada pula desa yang tidak dapat memaksimalkan dana desa yang diperolehnya, sehingga tujuan dari dana desa itu tidak tercapai sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasannya tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.¹

Pada era globalisasi saat ini informasi terkait kebijakan pemerintah sudah mudah diakses oleh semua pihak termasuk juga terkait dana desa. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dana desa semakin cerdas dan kritis. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pembangunan diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan UU yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kelembagaan sebagaimana termaktub dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang

¹ Diakses dari, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6. pada tanggal 22 Agustus 2022, pukul 07.23 wib.

digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.²

Salah satu cara menganalisis kinerja pemerintah yaitu dengan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *Value For Money (VfM)* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money (VfM)* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.³

Penjabaran terkait tiga elemen utama dalam *Value For Money (VfM)* adalah sebagaimana berikut: **Ekonomi** merupakan perolehan dari pembelian barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas input tertentu. **Efisiensi** berarti mencapai *output* yang maksimal dengan *input* tertentu, atau menggunakan *input* terkecil untuk mencapai *output* tertentu dengan sedikit usaha untuk mencapai tujuan. **Efektivitas** merupakan tingkat pencapaian hasil dari suatu program yang telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Isna dan Ayu pada pengadilan negeri Tebing Tinggi bahwasannya dalam kurun waktu 2010 sampai 2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102,27% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Analisis rasio efesiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69% berada diatas 100%. Hal ini

² Ibid.

³ Dwi Purwiyanti, "Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi," n.d.,190.

⁴ Luthfia Ayu Karina and Wahyu Ramadhani, "Analisis KinerjaKeuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong," *Value* 2, no. 2 (January 26, 2022):74-76, <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.

menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien VFM dan menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05% berada dibawah 100%, sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi.⁵

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Putu Adi Erawan, bahwasannya dari penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Buleleng yaitu kantor bupati buleleng mengenai penerapan *Value For Money* untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari sangat berpengaruh secara signifikan antara penerapan *Value For Money* dengan peningkatan kinerja lembaga non keuangan kabupaten. Apabila pemerintah kabupaten Buleleng sudah mengoptimalkan konsep ini maka secara umum mempengaruhi kinerja lembaga nonkeuangan sendiri yang didasari oleh kepercayaan oleh publik, lembaga nonkeuangan lain dan pemerintah daerah begitu juga sebaliknya. Hal ini tentunya menjadi peranan pimpinan dalam mengoptimalkan kinerja organisasi sektor publik.⁶

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Sayutiuti, Jamaluddin dan Muhammad Sapril Sardi Juardi bahwasannya penerapan konsep *value for money* dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) dilihat dari program-program kerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja sebagian besar program kegiatannya berjalan ekonomis dan hanya 1 program dengan kategori

⁵ Isna Ardila dan Ayu Anandya Putri, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 15, No.1/Maret 2015,84.

⁶ Putu Edi Irawan ,dkk. "Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 3, Desember 2018,192.

cukup ekonomis hasil yang diperoleh dikatakan ekonomi karena sesuai target tidak terjadi pemborosan. pengukuran kinerja cukup efisien 1 program kerja hanya 3 program kerja yang efisien sedangkan 10 program dalam kategori kurang efisien ini akibat dari biaya anggaran tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan penghematan terjadi tetapi hanya sedikit program kerja yang efisien dan tidak memanfaatkan dana secara baik, suatu kinerja program di katakan efisien mendapatkan output penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Pengukuran kinerja dari efektifitas program kerja dikatakan cukup efektif karena dari 13 program kerja. 11 program kerja kategori efektif sesuai target 1 program kerja kurang efektif tetapi ada 1 program kerja tidak efektif karena masih ada kegiatan dari program kerja tidak terlaksana. Dikatakan efektif apabila semua program kerja serta kegiatan-kegiatan dari program kerja tersebut terlaksana sesuai hasil atau target yang diinginkan.⁷

Maka dari beberapa pernyataan dan telaah teori diatas dapat dipahami bahwa, tiga elemen utama dalam konsep *Value For Money* (VFM) sangat penting digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah atau sektor pelayanan publik lainnya. Hal ini guna menghindari terjadinya pengeluaran yang boros dan tidak produktif, dalam organisasi pelayanan publik. Dengan kata lain organisasi harus mengedepankan sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sehingga organisasi lebih dapat memaksimalkan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam arti meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang memberikan pelayanan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena terjadinya penghematan dalam penggunaan input,

⁷ Sayuti Sayuti,Dkk."Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)",*Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 September. 2018,16-28.

dan alokasi belanja yang lebih erorientasi pada kepentingan publik.

Sebagai salah satu desa dengan dana desa yang banyak, maka diperlukan adanya analisis kinerja pemerintah. objek dalam penelitian ini penulis memilih Desa Murtajih. Desa Murtajih merupakan sebuah desa yang dijadikan sebagai desa percontohan atau desa tematik. Artinya Desa Murtajih merupakan sebuah desa yang dikembangkan menjadi suatu desa dengan tema tertentu. Berdasarkan pada pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol bahwasannya “Desa tematik merupakan desa yang dikembangkan dengan tema tertentu misalnya, wisata alam, wisata batik, dan wisata kuliner”.⁸ Dalam hal ini Desa Murtajih dirancang akan dikembangkan menjadi desa wisata alam. Adapun Perancangan desa wisata alam terumuskan dalam konsep visi dan misi pemerintahan di Desa Murtajih. Rumusan visi Desa Murtajih yakni “Terwujudnya desa murtajih yang mandiri berbasis pertanian, mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”. Sementara itu, Misi desa murtajih adalah “Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan secara menyeluruh dan berkesinambungan, meningkatkan sarana dan prasarana publik, meningkatkan sumber daya aparatur sejalan dengan perkembangan dan dapat meningkatkan sektor unggulan dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa”.

Selain itu Desa Murtajih disebut juga desa unik, karena anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan.⁹ Berikut tabel anggaran dana Desa Murtajih per periode 2016-2021.

⁸“*Radar Madura / Radar Madura Official Website*”. diakses dari, <https://radarmadura.jawapos.com/>, pada tanggal 24 mei 2022 pukul 10.10 wib.

⁹“*KPBU - Value for Money (VfM)*”. diakses dari, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-formoney-vfm>, pada tanggal 13 mei 2022 pukul 10.15 wib.

Tabel 1.2
Anggaran Dana Desa Murtajih

No.	Tahun	Anggaran	Persentase
1.	2016	Rp 509.079.000	
2.	2017	Rp 532.030.000	4,5%
3.	2018	Rp 859.830.000	64,3%
4.	2019	Rp 888.605.000	74,5%
5.	2020	Rp 916.485.000	80,02%
6.	2021	Rp 1.274.804.000	150,4%

Sumber: <http://jdihdokum.pamekasankab.go.id> diolah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Laju Pertumbuhan Anggaran Dana Desa Murtajih, selama kurun waktu 6 tahun terakhir dinilai baik atau konsisten. Peningkatan dana desa untuk Desa Murtajih dikarenakan pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan status desa, sebagaimana disampaikan oleh Badrut Tamam selaku Bupati Pamekasan yang dikutip dari ANTARA yaitu upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk terus meningkatkan desa dari berkembang ke desa maju dan dari desa maju ke desa mandiri hingga kini terus dilakukan. Bupati Pamekasan menjelaskan, penetapan desa mandiri tersebut oleh Kementerian Desa berdasarkan penilaian yang dilakukan secara langsung selama kurun waktu 2018-2021.¹⁰

Berdasarkan data dari tabel di atas, laju persentase anggaran dana kian meningkat per tahunnya, yang semula pada tahun 2017 sebesar 4,5%, meningkat

¹⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/2946177/bupati-pamekasan-perekonomian-sebagian-desa-sudah-mandiri> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 10.22 wib.

pada tahun selanjutnya 2018 sebesar 64,3%, dilanjutkan meningkat di tahun 2018 sebesar 74,5%, berlanjut meningkat di tahun 2019 sebesar 80,02%, pada tahun 2020 pun meningkat sebesar 80,02%, dan terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar 150,4%. Tren laju pertumbuhan anggaran dana desa di Desa Murtajih ini menjadi angin baik untuk pengadaan agenda-agenda pencapaian rencana pembangunan dan perbaikan fasilitas desa, guna mencapai target desa maju.

Konsep analisis *Value For Money* digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan desa, lebih tepatnya di Desa Murtajih. Salah satu agenda dana desa pada tahun 2019 yang dilakukan oleh aparat desa, ialah dengan menyulap lahan perkampungan menjadi “Lahan Wisata Terpadu Bhurunan Murtajih”. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan, mengandalkan Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk pembangunan wisata terpadu tersebut.¹¹ Agenda pembangunan wisata terpadu tersebut meliputi inovasi wisata budidaya ikan air tawar, eduwisata hidroponik, taman bunga, agro wisata, kerapan sapi, kuliner khas desa.¹² Agenda pembangunan wisata terpadu bhurunan Murtajih kemudian telah resmi rampung pada tahun 2020 dan sudah siap dinikmati oleh para pengunjung.

Agenda wisata terpadu yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, nantinya apakah bisa menghasilkan *outcome* (hasil pendapatan) yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Maka hal ini menjadi menarik dan memerlukan adanya penelitian

¹¹ “PUPR Gerojok Rp500 Juta Untuk Bangun Bendungan Di Dua Desa Di Pamekasan | Kabar Madura,” diakses dari <https://kabarmadura.id/pupr-gerojok-rp500-juta-untuk-bangun-bendungan-di-dua-desa-di-pamekasan/>, pada tanggal 13 mei 2022, pukul 10.36 wib.

¹² “Desa Murtajih; Kolaborasikan Potensi Alam dan Pertanian sebagai Wisata Terpadu | Kabar Madura,” diakses dari, <https://kabarmadura.id/desa-murtajih-kolaborasikan-potensi-alam-dan-pertanian-sebagai-wisata-terpadu/>, pada tanggal 17 April 2021 pukul 12.19 wib.

lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti memilih judul terkait tentang data “Anggaran Dana Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, untuk menilai kinerja pemerintahan yang diukur dengan konsep *Value For Money*”. Apakah memang agenda pengeluaran dana desa untuk pembuatan wisata terpadu tersebut dapat menambah atau malah mengurangi anggaran dana desa. Untuk meneliti manfaat anggaran dana desa tersebut salah satunya bisa diukur dengan konsep *Value For Money* yang menggunakan tiga jenis rasio pengukuran yaitu, pengukuran tingkat ekonomis, tingkat efektivitas, dan tingkat efisien dari anggaran.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja pemerintah desa menggunakan konsep *Value For Money* pada Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *Value For Money* yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintahan Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil

penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.¹³ Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang kinerja pemerintah menggunakan konsep *Value For Money*. Khususnya pada Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, pengetahuan, secara langsung dilapangan tentang konsep *value for money* yang dapat mengukur kinerja pemerintahan pada Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- b. Bagi IAIN Madura, diharapkan hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan rujukan atau bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama atau sejenisnya yang berkaitan dengan analisis kinerja pemerintah desa dengan menerapkan konsep *Value For Money*. Serta menjadi tambahan referensi karya tulis ilmiah pada perpustakaan khususnya bagi jurusan ekonomi bisnis islam, program studi Akuntansi syariah.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan di masa depan dan untuk acuan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk semua fakultas khususnya Fakultas

¹³ Syafnidawaty, "[Manfaat Penelitian – Universitas Raharja](#)" diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 11.58 wib.

Ekonomi dan Bisnis Islam.

- d. Bagi Desa Murtajih, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi masyarakat tentang analisis kinerja pemerintah pada Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi istilah yang dibuat dapat berbentuk definisi istilah yang diukur, ataupun definisi istilah eksperimental.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis variabel utama yaitu:

1. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi, pemerintah desa atau yang telah ditentukan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan kebutuhan secara efektifitas.¹⁵

2. Anggaran Dana Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang

¹⁴ Pinto setya Mustafa,dkk,"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olah Raga", *fakultas ilmu keolahragaan universitas negeri malang*, 2020,33.

¹⁵ Aang Kusnendar, "Kinerja Pemerintah Desa Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran,"8.

desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.¹⁶

Dana Desa merupakan anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan hak pemerintah desa untuk menggunakan sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam hal ini pemerintah desa harus dapat menetapkan mana yang menjadi prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.¹⁷

3. *Value For Money*

Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Melalui konsep *value for money* memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakatnya.¹⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk digunakan pada penelitian selanjutnya, hal ini untuk membandingkan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu sebagai berikut:

¹⁶ <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID714G0&p=apbdes+adalah> diakses pada tanggal 13 mei 2022, pukul 10.12 wib

¹⁷ Marisa S. B Seran 1, *Value For Money* : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 4 , No. 1, Juni 2021, pp. 94 – 10.

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html> diakses pada tanggal 12 mei 2022 pukul 15.10 wib

1. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh Renaldi Putra yang berjudul: “Penerapan Konsep *Value for Money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Polres Ogan Ilir”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah data anggaran dan realisasi anggaran Polres Ogan Ilir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013 sudah memenuhi 2 elemen *value for money* yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektif tidak efektif. Perhitungan rasio ekonomis kurang dari 100% kecuali tahun 2011. Rasio efisiensi cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya, kecuali pada tahun 2011. Dan rasio efektifitas tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.¹⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlayli Magfiroh, Siti Rosyafah, Tri Lestari dengan judul “Analisis penerapan pengukuran *Value for Money* pada APBDDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto)”. Diperoleh hasil yaitu bahwa:
 - a) Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi ekonomi selama tiga tahun anggaran dari tahun 2016-2018 berada pada kategori ekonomis karena berada pada presentase lebih dari 100%, sehingga semakin baik dalam meminimalisir *input* primer berupa anggaran untuk mencapai kegiatan.

¹⁹ Renaldi Putra, “Penerapan Konsep Value For Money dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik pada Polres Ogan Ilir”, *Jurnal Diglip Binadrama*, (2014), 11.

- b) Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi efisiensi tahun 2017 diperoleh hasil lebih dari 100%, dikategorikan tidak efisien karena kurangnya perencanaan dan pengendalian belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa, sehingga realisasi belanja lebih tinggi daripada realisasi pendapatan artinya belum bisa meminimalkan dana anggaran. Tetapi pemerintahan Desa Parengan terus berupaya dalam memperbaiki kinerja keuangan dari segi efisiensi yang pada tahun 2016 diperoleh hasil 93,92% dan tahun 2018 yaitu 90,77% menunjukkan hasil antara 90% sampai 99% sehingga dikategorikan efisien karena realisasi belanja lebih rendah dari realisasi pendapatan.
- c) Kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan dari segi efektivitas dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa semakin besar tingkat keberhasilan pemerintahan Desa Parengan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Khalimatus Sya'diyah, Widya Susanti, Ali Rasyidi dengan judul “Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Diperoleh hasil yaitu bahwa:
- a) Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value For Money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomi selama tiga tahun menunjukkan

²⁰ Nurlyli Magfiroh, dkk “Analisis Penerapan Pengukuran Value for Money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto),” *UAJ: Ubhara Accounting Journal* 1, no. 2 (November 2021),300–306.

kriteria sangat ekonomis yaitu mengalami peningkatan.

- b) Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for Money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun mengalami peningkatan efisiensi meskipun terjadi fluktuasi.
 - c) Kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan metode *Value for Money* dengan menggunakan teknik perhitungan rasio efektifitas selama tiga tahun terjadi fluktuasi.²¹
4. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money* Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut PAD. Hasil penelitiannya menunjukkan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio sebagai berikut:
- a) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis.
 - b) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien.

²¹ Khalimatus Sya'diyah, dkk “Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo,” n.d., 12.

c) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.²²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nindy Feriska Sari, cahya dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02%, 89,98%, 89,77% dan 90,68%.

Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95% dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84%, 101,21% dan 101,28% dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun

²² I Made Ita Purnamasari, Desak 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *Ejournal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen* Vol.2.

cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.²³

Tabel 1.3
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1.	Renaldi Putra	Objek penelitian ialah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sedangkan objek peneliti dahulu pada Polres Ogan Ilir. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan dipenelitian ini adalah Pemerintah Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.	Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan <i>value for money</i> dan rumus yang digunakan pada rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas.
2.	Nurlyli Magfiroh, Siti Rosyafah, Tri Lestari	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan dipenelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif.	Adapun persamaannya Sama – sama menggunakan data primer, wawancara dan observasi.
3.	Khalimatus Sya'diyah, Widya Susanti, Ali Rasyidi	Objek penelitiannya ialah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo daritahun 2013-2015.	Sama-sama menggunakan pengukuran <i>value for money</i> dalam menilai

²³ Nindy Feriska S. Cahya, 2014. “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money” (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Surabaya*.

		Sedangkan objek penelitian yang dilakukan dipenelitian ini adalah Pemerintah Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016-2021.	kinerja keuangan pemerintahan.
4.	I Desak Made Ita Purnamasari	Objek penelitiannya ialah menggunakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan dipenelitian ini adalah Pemerintah Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.	Sama – sama menggunakan konsep <i>value for money</i> dalam menilai penerimaan pendapatan asli daerah.
5.	Nindy Cahya Feriska Sari	Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan dipenelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif.	Sama – sama menggunakan Data kuantitatif